

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal : Analisa Keuangan Pada Kabupaten Bandung Barat

Febricia Frontalin Kumendong ^{a,*} and Francis M. Hutabarat ^b

^a*Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia, ffkumendong@gmail.com, Indonesia*

^b*Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia, fmhutabarat@unai.edu, Indonesia*

Abstract. Adanya penurunan ekonomi di tahun 2015 menjadi faktor yang mempengaruhi alasan mengapa penelitian ini dibuat. Yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bandung Barat. Data pada penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi APBD kabupaten Bandung Barat pada 2010-2017. Semua data pada laporan dijadikan populasi dalam penelitian ini dan diperoleh sebanyak 8 tahun. Teknik analisis regresi linear menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap variable X yang di gunakan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variable Y. Dengan ada nya penelitian ini dapan menjadi bantuan untuk pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan pengawasan atas pemanfaatan DAU dan DAK dan PAD untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah.

Keywords: Belanja Modal, DAK, DAU, PAD, APBD

*Corresponding author. E-mail: ffkumendong@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia menganut kebijakan Otonomi daerah sejak 2001 dan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999. Oleh karena itu, Daerah memiliki wewenang untuk mengatur aturan-aturan yang berlaku di daerahnya masing-masing yang sesuai dengan data Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2018, Indonesia terdata memiliki 34 Provinsi dan 416 Kabupaten. Dimana pada tanggal 4 Juli 1950 dan tercatat dalam UU No 11 Tahun 1950, Provinsi Jawa Barat sah masuk menjadi provinsi Indonesia dan pada 2 Januari 2007, Kabupaten Bandung Barat sah menjadi anggota pada provinsi Jawa barat sesuai dengan UU No 12 Tahun 2007.

Kabupaten bandung barat adalah kabupaten yang baru dibentuk pada 2007 dan baru beroperasi dengan teratur sejak tahun 2010. Analisa terhadap Kabupaten Bandung Barat ini dapat menjadi tolak ukur bagi pemekaran daerah dari provinsi dan kabupaten lainnya. Setelah sekitar 10 tahun berdiri, adalah menarik melihat kondisi keuangan dan anggaran serta alokasi dana daerah dan tentunya melihat kondisi pendapatan asli daerah yang menjadi tolak ukur otonomi daerah

Setidaknya ada 3 tujuan Otonomi daerah menurut Yunisda Dwi Saputri (2019) yaitu:

1. Tujuan Politik. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan terciptanya sarana dan prasarana yang lebih terfokus.
2. Tujuan Administratif. Kebijakan ini membantu pembagian administrasi pemerintahan, serta manajemen birokrasi, kegiatan ini diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan adanya kesempatan kepada masyarakat daerah turut menyelenggarakan pemerintahan.
3. Tujuan Ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah menjadi lebih baik serta memaksimalkan daya saing serta kualitas produksi daerah tersebut sehingga berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 menyatakan, Setidaknya Pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan sumberdaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat daerah tersebut.

Otonomi daerah lahir oleh karena kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Hal ini mampu memulai pemerintahan daerah yang dipilih dengan cara demokratisas, diharapkan dapat terjadinya

penyelenggaraan pemerintah yang mampu merespon cepat terhadap kepentingan masyarakat luas.

UU No 23 Tahun 2014 Mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan Pemerintahan Daerah membuat aturan dalam mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 Anggaran daerah adalah rencana keuangan sebagai dasar dalam pelayanan kepada publik. Anggaran menjadi sangat berhubungan dengan kinerja pemerintahan daerah karena sesuai dengan UU No. 25 tahun 2009 salah satu tanggungjawab pemerintahan adalah untuk melayani penduduk daerah yang menjadi ruang lingkup ke pemerintahannya. Didalam anggaran terpapar apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada di daerah (Amin, 2019:81)

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan tolak ukur kemandirian pemerintah daerah, Pemerintah perlu mendokrak peningkatan pendapatan untuk daerah. Menurut Amin (2019:88-89) setidaknya ada 3 pembagian pendapatan daerah yaitu 1. PAD yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. 2. Dana Perimbangan yang didalamnya meliputi DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil. 3. Pendapatan Lain-Lain yang Sah yang meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, dan lain-lain.

Kemampuan pengelolaan Anggaran daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai tugas pembangunan. APBD menjadi bagian yang penting dalam pemerintahan. Belanja Daerah jika terkelola dapat menjadi pelindung dan peningkat kualitas hidup masyarakat daerah yang merupakan salah satu tugas daerah. Yang menjadi bagian belanja daerah yang perlu diperhatikan untuk dikelola adalah Belanja Modal (Abdullah dan Riza, 2014). Pemerintah daerah harus menempatkan anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk upaya peningkatan pelayanan kepada public. (Isti & Titik, 2016)

Salah satu yang menjadi fenomena atau masalah yang terjadi dalam menjalankan Otonomi Daerah adalah mengenai Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pada 2015 Tempo.co mengabarkan adanya penurunan pendapatan di Jawa Barat yang salah satu bagiannya adalah kabupaten Bandung Barat sebesar 436 Miliar. Sehingga anggaran yang telah disusun harus mengalami perubahan yang terjadi pada Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2015. Fenomena lain adalah terkait penelitian terdahulu dimana terdapat gap antara penelitian yang mengatakan adanya pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. (Hidayah & Setiyawati (2014), Aditya & Maryono (2018)) dengan penelitian lain yang mengatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. (Edy Meianto dkk (2013), Vanesha dkk (2019))

Oleh Karena itulah, penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui seberapa besarkah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Tinjauan Literatur

Otonomi Daerah

Menurut KBBI (2008:992) otonomi diartikan sebagai pemerintahan mandiri. Otonomi daerah adalah hak pemerintah daerah untuk mengendalikan dan mengembangkan daerah dengan sesuai UU yang berlaku Hanif Nurcholih (2007:30) UU yang membahas tentang Otonomi Daerah adalah UU No 32 Tahun 2004, yang menyatakan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus urusan administrasi dan kebutuhan masyarakat daerah sesuai UU.

Adisasmita (2011:3) menyatakan bahwa bahwa Otonomi daerah (Kota dan/atau Kabupaten) mampu melaksanakan secara luas serta bertanggung jawab atas pemerintah daerah secara seimbang yang memberikan keadilan dan bias menggunakan sumber daya secara sepenuhnya.

APBD

APBD adalah perencanaan keuangan oleh pemerintah daerah tahunan yang dibahas oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD (Halim (2012:10)). UU No 17 tahun 2003 mendefinisikan

APBD sebagai usaha pengelolaan keuangan daerah untuk setiap tahunnya sesuai dengan UU daerah yang berlaku.

Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Dana alokasi umum menurut Bastian (2003:84), Merupakan dana perimbangan yang diharapkan dapat

mengatasi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Halim (2002:160) menyatakan Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBD. Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJPK menyatakan bahwa salah satu tujuan DAU adalah pemerataan kemampuan daerah dalam keuangan guna memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah dari APBN, dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan operasional daerahnya terkait desentralisasi. (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016) Dengan demikian jika pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap peningkatan Dana Alokasi Umum, maka tentunya Belanja Modal dengan sendirinya akan meningkat. Dan dengan berkurangnya Dana Alokasi Umum maka kemampuan pemerintah daerah dalam Belanja Modal nya akan berkurang dengan sendirinya.

Menurut penelitian dilakukan oleh Suryana (2018), Hidayah & Setiyawati (2014), Firnandi dan Nur (2016) terdapat pengaruh signifikan antara DAU dan Belanja Modal.

Sedangkan menurut hasil penelitian Mohamad (2013), Edy Meianto dkk (2013), Aditya & Maryono (2018) Terdapat pengaruh tidak signifikan DAU terhadap Belanja Modal

H1: Ada pengaruh positif antara alokasi umum dan belanja modal

Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Dana alokasi khusus menurut Menurut UU No 32 Tahun 2004 Merupakan Dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. Halim (2014:16) Menyatakan bahwa dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJPK, setidaknya terdapat delapan bidang yang menjadi pusat kegiatan Dana Alokasi Khusus. Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, Infrastruktur Sanitasi, Prasarana Pemerintahan Desa, Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah dari APBN, dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah

sehingga pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan khusus dengan prioritas nasional. (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016) Dengan demikian jika pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap peningkatan Dana Alokasi Khusus, maka tentunya Belanja Modal dengan sendirinya akan meningkat. Dan dengan berkurangnya Dana Alokasi Khusus maka kemampuan pemerintah daerah dalam Belanja Modal nya akan berkurang dengan sendirinya

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamas Fauzie Farid (2004), Anggaraeni Dewi (2010), Agus & Mohamad (2013) terdapat pengaruh yang signifikan antara DAK terhadap Belanja Modal. Sedangkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Edy Meianto dkk (2013) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

H2: Ada pengaruh positif antara alokasi khusus dan belanja modal

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

Pendapatan asli daerah menurut Djaenuri (2012) PAD merupakan pendapatan untuk daerah yang bersumber dari wilayah daerah sendiri berdasarkan aturan daerah yang berlaku. Budi S. Purnomo (2009:34) Menyatakan setidaknya terdapat empat sumber pemasukan daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pemasukan dana kepada pemerintah daerah dari daerah itu sendiri, dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan di daerah tersebut, Dengan demikian jika pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka tentunya Belanja Modal dengan sendirinya akan meningkat. Dan dengan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah maka kemampuan pemerintah daerah dalam Belanja Modal nya akan berkurang dengan sendirinya

Hasil Penelitian Hidayah & Setiyawati (2014), Aditya & Maryono (2018) menunjukkan pengaruh signifikan antara PAD terhadap Belanja Modal. Sedangkan menurut hasil penelitian Vanesha dkk (2019) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapat Asli Daerah dan Belanja Modal.

H3: Ada pengaruh positif antara pendapatan asli daerah dan belanja modal

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain asosiatif, yang merupakan penelitian dengan menyelidiki pengaruh variabel dengan variabel yang lainnya. Penelitian dilaksanakan pada Kabupaten Bandung Barat dengan objek penelitian laporan keuangan Kab. Bandung Barat dari tahun 2010-2017.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan variabel dependen adalah Belanja Modal.

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data kuantitatif dan data sekunder diperoleh dari Pemerintah Kab. Bandung Barat. Dalam bentuk laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada tahun 2010-2017. Semua data pada laporan dijadikan populasi dalam penelitian ini dan diperoleh sebanyak 8 tahun. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non-partisipan dengan teknik analisis regresi linear menggunakan perangkat lunak SPSS. Persamaan regresi ini adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_nX_n \dots$$

Keterangan:

- Y = Belanja Modal
- X1 = Dana Alokasi Umum
- X2 = Dana Alokasi Khusus
- X3 = Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian disajikan sebagai berikut, yang meliputi statistik deskriptif, correlation analysis, uji asumsi klasik dan regression model. yang digunakan dalam penelitian ini.

Descriptive Statistics

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa statistik deskriptif dari variabel yang diteliti meliputi DAU, DAK dan PAD dengan Belanja Modal.

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
X1	8	584.62	1103.29	896.89	195.31738
X2	8	49.80	407.59	134.36	134.05161
X3	8	51.36	609.92	252.36	181.30472
Y	8	361.85	1804.62	979.92	574.11112
Valid N (listwise)	8				

Dimana X1 adalah DAU, X2 adalah DAK, X3 adalah PAD dengan Y sebagai Belanja Modal. DAU memiliki nilai minimum 584.62, nilai maksimum 1103.29, nilai rata-rata 896.89, dan standar deviasi 195.31738. Nilai DAK terendah adalah 49.80, nilai tertinggi adalah 407.59, dan nilai rata-rata 134.36, dan standar deviasi adalah 134.05161. Nilai minimum PAD adalah 51.36, nilai maksimum adalah 609.92, nilai rata-rata adalah 252.36, dan standar deviasi adalah 181.30472. Sedangkan pada Belanja Modal nilai terendah didapati adalah 361.85, nilai tertinggi adalah 1804.62 rata-rata nya adalah 979.92, dan standar deviasi adalah 574.11112.

Correlation Analysis

Tabel 2
Correlation Analysis

	X1	X2	X3	Y
X1	1	.590	.853**	.869**
X2	.590	1	.873**	.797*
X3	.853**	.873**	1	.926**
Y	.869**	.797*	.926**	1

Source: Data processed, 2020

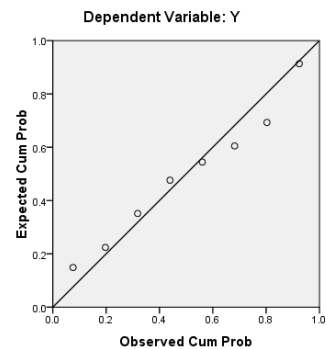
Uji Asumsi Klasik

Tabel 3
Autocorrelation

Model	Durbin-Watson
1	1.979

Tabel diatas menunjukkan bahwa DW 1.979 berada diantara -2 dan 2 maka uji diterima bahwa tidak terjadi autokorelasi.

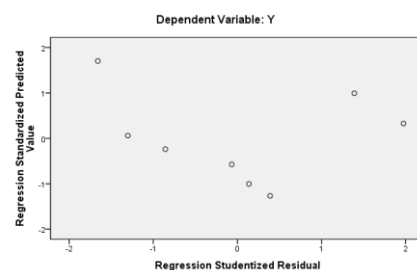
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1. Normality Test

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dilihat bahwa titik plot berada diantara garis diagonal, maka uji diterima bahwa data terdistribusi dengan normal.

Scatterplot



Gambar 2. Heterocedasticity

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dilihat bahwa titik plot tersebar dan tidak membentuk pola, maka uji diterima bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Regression

Tabel 4
Model Summary

Model	R	R Square	Adj R Square	Std. Error of the Estimate
1	.942 ^a	.888	.804	254.06615

Tabel 5
F-Test

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2049026.639	3	683008.880	10.581	.023 ^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Residual	258198.426	4	64549.606		
Total	2307225.065	7			

Tabel diatas menunjukkan bahwa F-hitung 10.581. dengan nilai sig. 0.023, maka uji diterima. Bahwa ada pengaruh yang signifikan antara DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Modal pada kab. Bandung Barat.

Tabel 6
t-Test

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Coeff	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-540.39	775.352	-	0.697	0.524
1 X1	1.213	1.187	0.413	1.022	0.365
X2	0.93	1.851	0.217	0.502	0.642
X3	1.219	2.118	0.385	0.575	0.596

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara parsial didapati tidak terdapat pengaruh signifikan antara X1 dan Y dengan t-hitung 1.022. dengan nilai sig. 0.365, tidak terdapat pengaruh signifikan antara X2 dan Y dengan t-hitung .502. dengan nilai sig. 0.642, tidak terdapat pengaruh signifikan antara X3 dan Y dengan t-hitung .575. dengan nilai sig. 0.596, maka uji diterima. Adapun persamaan regresi yang di dapaat dari table diatas adalah:

$$Y = -540.391 + 1.213X1 + 0.930X2 + 1.219X3$$

Pada hipotesis pertama menyatakan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. dengan hasil penelitian dilihat dari nilai t-hitung 1.022 dan nilai sig 0.365 di atas standar 5% atau 0,05. Ini berarti Ho ditolak. Hal ini menunjukkan adanya indikasi pengaruh yang positif antara DAU terhadap BM hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya DAU dapat meningkatkan kan BM. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suryana (2018), Hidayah & Setiyawati (2014), Firnandi dan Nur (2016) yang berpendapat ada pengaruh yang signifikan antara DAU dan BM. Di sisi lain, ditemukan menurut Mohamad (2013), Edy Meianto dkk (2013), Aditya & Maryono (2018) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara DAU dan BM.

Pada hipotesis kedua menyatakan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. dengan hasil penelitian dilihat dari nilai t-hitung 0.502 dan nilai sig 0.642 di atas standar 5% atau 0,05. Ini berarti Ho ditolak. Hal ini menunjukkan adanya indikasi pengaruh yang positif antara DAU terhadap BM hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya DAU dapat meningkatkan kan BM. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Mochamas Fauzie Farid (2004), Anggaraeni Dewi (2010), Agus & Mohamad (2013) berpendapat ada pengaruh yang signifikan antara DAK dan BM. Di sisi lain, ditemukan menurut Edy Meianto dkk (2013) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara DAK dan BM.

Pada hipotesis ketiga menyatakan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. dengan hasil penelitian dilihat dari nilai t-hitung 0.575 dan nilai sig 0.596 di atas standar 5% atau 0,05. Ini berarti Ho ditolak. Hal ini menunjukkan adanya indikasi pengaruh yang positif antara PAD terhadap BM hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya PAD dapat meningkatkan kan BM. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hidayah & Setiyawati (2014), Aditya & Maryono (2018) yang berpendapat ada pengaruh yang signifikan antara PAD dan BM. Di sisi lain, ditemukan menurut Vanesha dkk (2019) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara PAD dan BM

Kesimpulan

Berdasarkan hasil di atas dapat dijelaskan bahwa, secara simultan, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal di Kab. Bandung Barat selama 2010-2017. Maka bias di tarik kesimpulan bahwa kenaikan DAU, DAK dan PAD mengakibatkan pula kenaikan pada Belanja Modal. Begitu pula sebaliknya, penurunan pada DAU, DAK, dan PAD berdampak penurunan pula pada nilai Belanja Modal.

Saran

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba menyarankan Pemerintah daerah Kab. Bandung Barat agar dapat memperhatikan serta memaksimalkan kinerja perangkat daerahnya dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. juga memaksimalkan penggunaan DAU dan DAK untuk

mengatasi ketidak merataan kemampuan antar daerah.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar : Graha Ilmu
- Aditya, Dina Mei Eka & Maryono. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi). *Prosiding SENDI_U 2018*, Retrieved from : <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/6044>
- Agus Budi dan Mohamad Ainur (2013). Pengaruh Pertumbuhan Asli Daerah, Dana Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 20(2), 184-198 Retrieved from: <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/3162>
- Amin, Fadillah (2019), *Penganggaran Di Pemerintah daerah*, Malang:UB Press
- Anggaraeni Dewi (2010). Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan.
- Bastian, Indra (2003). *Sistem Akuntansi Publik Konsep Untuk Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budi, Purnomo S (2009). *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Djaenuri, A. (2012) *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Farid, Mochamad Fauzie (2004). Pengaruh PDRB, PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur.
- Fikri, Ahmad (2015), *Ekonomi Lesu, Pendapatan Jawa Barat Anjlok Rp 436 Miliar*, Retrieved from : <https://nasional.tempo.co/read/697903/ekonomi-lesu-pendapatan-jawa-baratanjlok-rp-436-miliar/full&view=ok>
- Firnandi & Nur (2016), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(3)
- Halim, Abdul (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayah, Nurul & Setiyawati, Hari (2014), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*. 18(1)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992)
- Kementrian Dalam Negeri (2019) *Pembentukan Daerah-Daerah di Indonesia Sampai Dengan 2014*, Retrieved from: <https://otda.kemendagri.go.id/wpcontent/uploads/2019/03/Pembentukan-Daerah-Daerah-Otonom-di-Indonesia-s.d-Tahun-2014-2.pdf>
- Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2016) *Dana Alokasi Khusus*, Retrieved from : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/01/DAK.pdf>
- Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2016) *Dana Alokasi Umum*, Retrieved from : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1776>
- Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 80-90.
- Meianto, Edy & Berti, Cherrya Dhia Wenny (2015), Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Retrieved from: <http://eprints.mdp.ac.id/1472/>
- Nurcholis, Hanif (2007), *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo
- Permatasari, Isti & Mildawati, Titik (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal Pada Kab/Kota Jawa Timur, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(1)
- Saputri, Yunisda Dwi (2019) *3 Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Diperingati Setiap 25 April*. Retrieved from: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3872913/3-tujuan-pelaksanaan-otonomi-daerah-yang-diperingati-setiap-25-april>
- Soekarwo (2003), *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Suryana (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal, *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2)
- UU No 11 Tahun 1950
- UU No 12 Tahun 2007
- UU No 17 Tahun 2003
- UU No 23 Tahun 2014
- UU No 33 Tahun 2004
- UU No. 22 Tahun 1999
- UU No. 25 Tahun 2009
- UU No. 32 Tahun 2004
- Vanesha, Venny Tria, Rahmadi, Selamat & Parmadi (2019) Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27-36, Retrieved from: <https://onlinejournal.unja.ac.id/paradigma/article/view/6609> doi: <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609>